

TUGAS AKHIR

“ ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG ”

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti
Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan
Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis*



Disusun oleh :

Verdyansyah Putra Adhiza

2100542059

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN DAN KEUANGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS

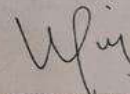
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Verdyansyah Putra Adhiza
No.BP : 2100542059
Jenjang Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Perbankan Keuangan
Judul Tugas Akhir : *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas
Pariwisata Kota Padang*

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2024 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

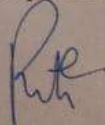
Padang,
Pembimbing,



Dra. Warnida, MM, AK
NIP. 196511181992032003

Mengetahui

Koordinator
Program Diploma III,



Dr. Rita Rahayu, SE, M.Si, Akt, CA
NIP. 197509052000032002

Ketua Program Studi
Perbankan Keuangan



Dra. Leli Sumarni, MS, MSi
NIP. 196212041987032001

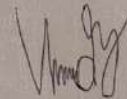
LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Verdyansyah Putra Adhiza**
No. BP : **2100542059**
Program Studi : **Perbankan Keuangan**
Judul Tugas Akhir : ***Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang***

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang” merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebahagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang,
Yang Menyatakan,



Verdyansyah Putra A

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan rezki serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pariwisata Kota Padang**”. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk melengkapi syarat mendapat kangelar Ahli Madya program studi Perbankan dan Keuangan, Jurusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dalam penulisan tugas akhir ini tentunya terdapat banyak kekurangan, tetapi penulis dapat menyelesaikan dengan semaksimal mungkin atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih pada :

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesempatan dan kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan Tugas Akhir hingga tuntas.
2. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., M.H selaku rektor Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Efa Yonedi, S.E., MPPM,Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Rita Rahayu, S.E, Akt, M.Si CA selaku koordinator Program Diploma III

Universitas Andalas.

5. Ibu dra., Leli Sumarni, MS, M.Si selaku Kepala Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan.
6. Ibu Rayna Kartika, SE, M.Com, Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan petunjuk kepada penulis agar selalu meningkatkan nilai atau IPK dari awal semester sampai dengan akhir semester.
7. Bapak Dra .Warnida, MM,Akt selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk membimbing penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh jajaran Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Diploma III Perbankan dan Keuangan Universitas Andalas yang telah memberikan materi pembelajaran selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Staff karyawan akademik Diploma III Universitas Andalas terimakasih banyak atas kemudahan dan bantuannya
10. Seluruh Dosen yang telah memberikan segala ilmunya kepada penulis selama penulis berkuliah, sehingga dapat menyelesaikan studi di UniversitasAndalas.
11. Bapak Yudi Indra Syani, S.SiT, M.T, Selaku kepala Dinas Pariwisata Kota Padang yang telah sangat membantu kelancaran selama Magang di Dinas Pariwisata Kota Padang, Ibu May Fitri Yanti SE ,selaku Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kota Padang yang telah memberikan ilmunya. Serta seluruh staf dan karyawan keluarga besar Dinas Pariwisata Kota Padang telah memebrikan kenyamanan dan ilmunya saat kegiatan magang.
12. Mama dan Papa yang sangat penulis cintai, sayangi, dan hormati. Penulis sangat berterimakasih atas segala pengorbanan dan doa serta dukungan dan kasih sayang yang di berikan oleh mama dan papa. Terimakasih atas seluruh doa dan pengorbanan serta

semangat yang mama dan papa berikan penulis dapat menyelesaikan kuliah hingga pembuatan tugas akhir ini

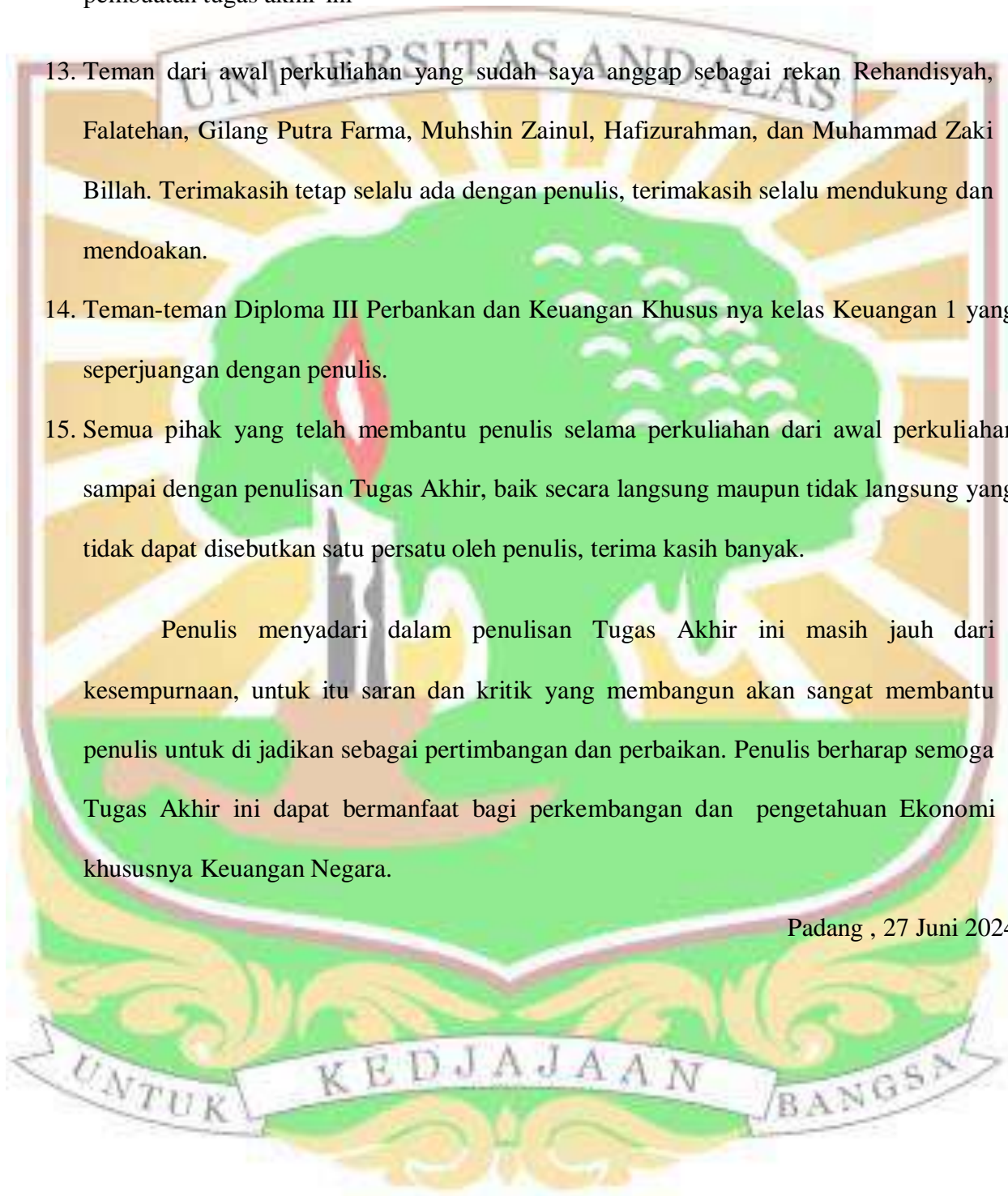
13. Teman dari awal perkuliahan yang sudah saya anggap sebagai rekan Rehandisyah, Falatehan, Gilang Putra Farma, Muhshin Zainul, Hafizurahman, dan Muhammad Zaki Billah. Terimakasih tetap selalu ada dengan penulis, terimakasih selalu mendukung dan mendoakan.

14. Teman-teman Diploma III Perbankan dan Keuangan Khusus nya kelas Keuangan 1 yang seperjuangan dengan penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dari awal perkuliahan sampai dengan penulisan Tugas Akhir, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih banyak.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu penulis untuk di jadikan sebagai pertimbangan dan perbaikan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan Ekonomi khususnya Keuangan Negara.

Padang , 27 Juni 2024



Verdyansyah Putra Adhiza

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Magang	3
1.4 Manfaat Magang	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Tempat dan Waktu Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Pengertian Analisis	8
2.2 Pengertian Laporan	9
2.3 Realisasi Anggaran	10
2.4 Laporan Realisasi Anggaran	13
BAB III GAMBARAN UMUM	16
3.1 Sejarah Dinas Pariwisata Kota Padang	16
3.2 Profil Pariwisata Kota Padang	17
3.3 Logo Dinas Pariwisata Kota Padang	18
3.4 Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Padang	18
3.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	26
4.1.1 laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	33
4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja	38
4.1.3 Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN HASIL	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, kinerja suatu organisasi sektor publik banyak menjadi sorotan. Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain.

Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga/organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi (Wuwungan dkk,2019).



Penilaian kinerja keuangan bagi entitas publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan, hal ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi, sehingga didapat suatu gambaran posisi keuangan secara menyeluruh. Masyarakat semakin cerdas dalam menilai suatu kinerja keuangan organisasi sektor publik, mereka mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Masyarakat mempertanyakan apakah dana yang digunakan sesuai atau tidak dengan apa yang mereka terima dari program-program yang dilaksanakan.

Untuk organisasi sektor publik itu sendiri contohnya pada Dinas Pariwisata juga memerlukan suatu pengukuran atas pencapaian kinerja keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan terkait dalam upaya peningkatan kinerjanya. Kondisi ini maka perlu dilakukan suatu pengukuran atas pencapaian kinerja instansi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan penilaian dalam pengambilan kebijakan.

Dinas Pariwisata wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dinilai apakah anggaran pada Dinas Pariwisata sudah direalisasikan dengan baik atau tidak. Se jauh mana Dinas Pariwisata melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran. Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun juga perlu didukung dengan laporan keuangan secara tertulis.

Dalam hal ini laporan pertanggungjawaban tersebut oleh Dinas Pariwisata dituangkan dalam LRA yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan adanya

LRA yang merupakan pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, maka laporan tersebut harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan, selain itu juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil.

Terkait dengan pernyataan di atas, untuk menunjang laporan realisasi anggaran yang baik maka perlu dilakukan suatu pengukuran atas pencapaian kinerja instansi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan penilaian dalam pengambilan kebijakan. Sehubungan dengan latar belakang dari masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah dengan perumusan masalah yaitu Bagaimana Efektivitas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2020 – 2021.

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah Untuk mengetahui efektivitas

kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2020 - 2021.

1.4 Manfaat Magang

Pengharapan dari penlisan yang dilaksanakan ini ialah memberikan beberapa manfaat lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

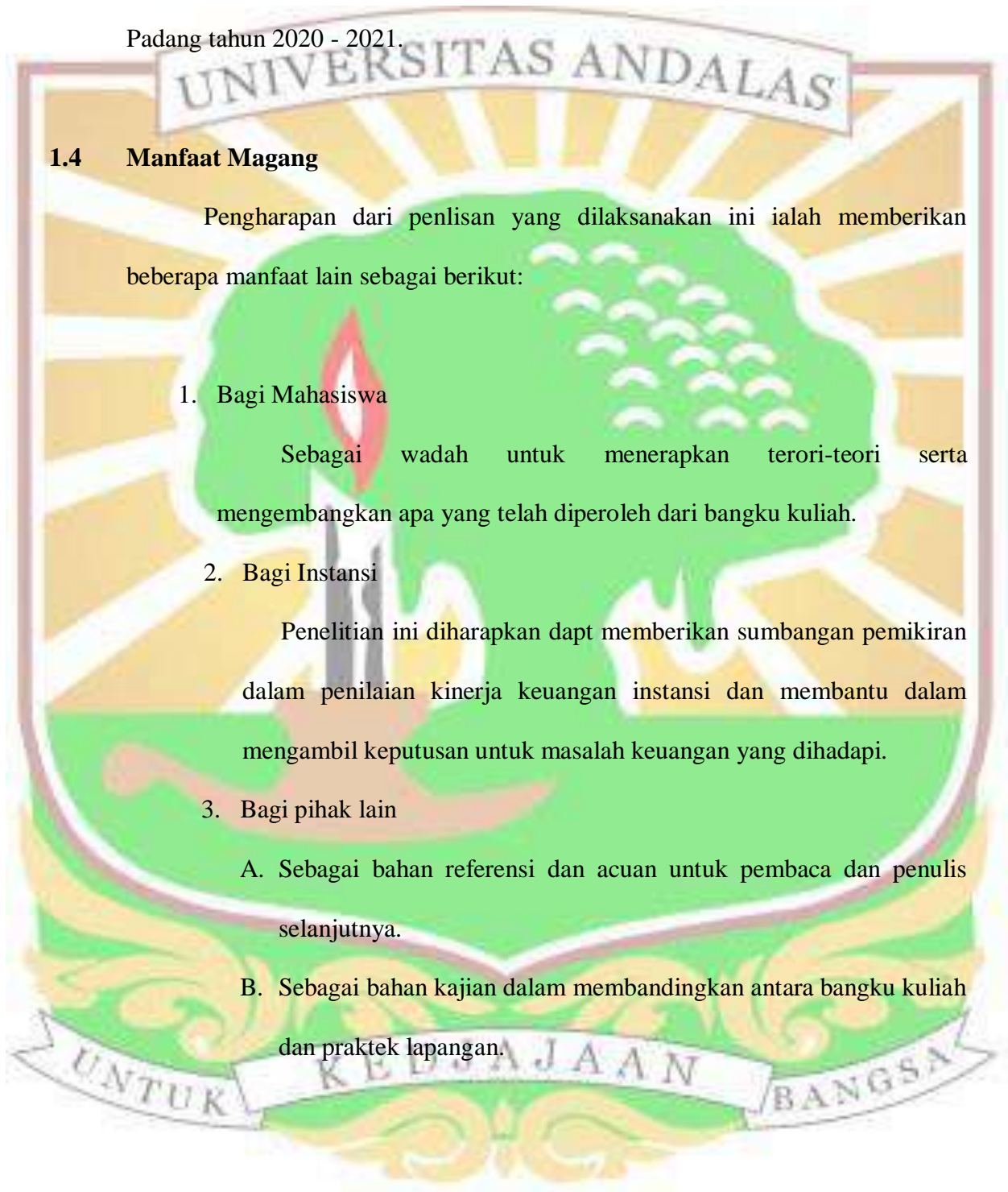
2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian kinerja keuangan instansi dan membantu dalam mengambil keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

3. Bagi pihak lain

A. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.

B. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek lapangan.



1.5 Metode Penulisan

2.1 Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke instansi terkait guna mendapatkan data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan. Metode ini dilakukan dengan melaksanakan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang.

2.2 Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dengan data yang diperlukan.

2.3 Studi Pustaka

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait dan mengunjungi website yang dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pada program magang ini penulis memilih Dinas Pariwisata Kota Padang di JL. Gandaria No.56, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatra Barat sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, penulis menentukan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut penelitian, perumusan masalah, signifikansi penelitian atau tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang dibahas.

BAB III GAMBARAN UMUM

Mendeskripsikan gambaran umum tempat magang yaitu Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan pada Dinas Pariwisata Kota Padang dan kendala apa yang dialami dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan rekomendasi saran untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Analisis

Dalam linguistik, analisis atau analysis (analisa) adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Sedangkan kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa zat dalam sampel. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan analisis kata atau analisis akademis sorotan, terutama di kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang harus analisis. Hal ini karena analisis kata adalah kata pinjaman dari bahasa asing (Inggris) adalah analisis.

Pengertian Analisis Menurut Para Ahli

- **Menurut Wiradi**

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

- **Menurut Komaruddin**

Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

- **Menurut Dwi Prastowo Darminto**

Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2.2 Pengertian Laporan

Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan juga bisa bermacam-macam isinya, tergantung kebutuhan. Mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggung jawaban.

Fakta yang disajikan dalam laporan pun tentunya berdasarkan keadaan objektif yang telah dialami sendiri oleh orang yang bertugas membuat laporan. Terutama saat ia melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan.

Definisi laporan juga bisa berbeda-beda, tergantung pada orang yang membuatnya. Berikut beberapa pengertian laporan menurut para ahli.

1. Himstreet (1998)

Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif. Digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu divisi organisasi kepada departemen lain atau lembaga lainnya, untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah.

2. J.C. Denyern

Laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis menyajikan informasi dalam format yang terorganisir, yakni berupa beberapa kesimpulan mengenai keadaan yang telah diselidiki untuk audiens tertentu dan dengan tujuan tertentu.

2.3 Realisasi Anggaran

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Adapun pengertian Realisasi Anggaran menurut Munandar (2012), adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget).

Secara umum anggaran didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu tertentu (masa yang akan datang).

Dilansir dari buku *Dinamika Politik Anggaran Pendidikan* (2023) oleh Andhyka Muttaqin, anggaran merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat yang orientasinya tidak lain adalah kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti Dikutip dari bukunya *Akuntansi Sektor Publik* (2010), anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana - rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam

pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut dan perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Pembahasan tentang realisasi anggaran seringkali menjadi perhatian penting karena mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut beberapa aspek yang relevan dalam pembahasan tentang realisasi anggaran:

1. **Pencapaian Tujuan Program:** Realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan.
2. **Monitoring Penggunaan Dana:** Penting untuk memantau bagaimana dana anggaran digunakan. Hal ini mencakup memeriksa apakah alokasi dana sesuai dengan kebutuhan aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
3. **Kepatuhan Terhadap Peraturan:** Realisasi anggaran juga menyoroti sejauh mana pengelolaan keuangan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa dan tata kelola keuangan lainnya.

4. **Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas:** Analisis realisasi anggaran membantu dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Misalnya, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai, atau apakah ada area di mana efisiensi dapat ditingkatkan.

5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses realisasi anggaran harus transparan sehingga pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat umum atau pemegang saham (dalam konteks perusahaan), dapat memahami bagaimana dan untuk apa dana anggaran digunakan. Ini juga mencakup akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana publik.

6. **Penyusunan Anggaran Berikutnya:** Hasil dari realisasi anggaran dapat memberikan masukan berharga untuk penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan implementasi program dapat membantu dalam meningkatkan perencanaan keuangan di masa depan.

Pembahasan tentang realisasi anggaran, oleh karena itu, melibatkan analisis mendalam terhadap semua aspek di atas guna memastikan penggunaan anggaran yang optimal, pemenuhan tujuan organisasi, serta transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

1. Pengertian

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Menurut Indra Bastian (2007:308), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode.

2. Unsur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran sendiri mencakup beberapa unsur yakni pendapatan LRA, transfer, belanja dan pembiayaan.

Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Pendapatan LRA

Unsur pertama yakni pendapatan laporan realisasi anggaran atau diartikan sebagai penerimaan dari Bendahara Umum Daerah/ Negara.

Bisa juga dari entitas pemerintah yang lain dengan menambah saldo untuk anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang dimaksud serta menjadi hak pemerintah, dengan artian tidak harus dibayar kembali.

2. Belanja

Unsur berikutnya adalah belanja yang mencakup keseluruhan pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah/ Negara. Kegiatan belanja ini umumnya menurunkan saldo anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang bersangkutan. Semua transaksi yang ada di dalam aktivitas belanja nantinya tidak diperoleh bayarannya kembali dari pemerintah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan dan pengeluaran uang dari suatu entitas dengan entitas yang lain. Termasuk didalamnya mencakup dana bagi hasil dan dana perimbangan atas suatu proyek.

4. Pembiayaan

Financing atau pembiayaan adalah setiap jenis transaksi pengeluaran atau penerimaan yang tidak akan mempengaruhi kekayaan suatu entitas. Semua jenis pembiayaan wajib dibayar dan akan diterima lagi berdasarkan periode yang sudah ditetapkan. Dalam anggaran pemerintah, unsur ini bertujuan sebagai penutup defisit.

3. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran: Laporan ini digunakan untuk membandingkan penggunaan anggaran yang telah direncanakan dengan penggunaan anggaran yang sebenarnya. Tujuannya adalah

untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah disusun dapat dipertanggungjawabkan dan apakah ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian di masa depan.

4. **Struktur Laporan:** Laporan realisasi anggaran biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, seperti:

- Pendapatan yang direalisasikan: mencatat semua pemasukan atau pendapatan yang telah diterima selama periode tertentu.
- Belanja atau pengeluaran yang direalisasikan: mencatat semua pengeluaran atau belanja yang telah dibuat sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
- Perbedaan antara anggaran dan realisasi: menganalisis perbedaan antara anggaran awal dengan realisasi yang sebenarnya, baik itu surplus atau defisit.

5. **Analisis Varian:** Analisis varian mengidentifikasi penyebab perbedaan antara anggaran dan realisasi. Varian dapat bersifat positif (surplus) atau negatif (defisit), dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan harga, pengeluaran tak terduga, atau keputusan manajerial.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Dinas Pariwisata Kota Padang

Untuk mengelola dan mengurus objek wisata Pantai Padang, baik itu ketertiban, kenyamanan, dan juga pengelolaan retribusi masuk dan retribusi pedagang, dibentuklah pada tahun 1983 Satuan Tugas (SATGAS). Sedangkan untuk kepemimpinan SATGAS dipimpin oleh Bapak Al Manar yang merupakan anggota dari TNI AD. Kemudian pada tahun 1986, SATGAS berubah menjadi Badan Pengelola Pariwisata Kota Padang, yang lebih difokuskan dalam pengelolaan pantai-pantai wisata yang ada di Kota Padang, Badan Pengelola Pariwisata Kota Padang ini dipimpin oleh Drs. Dasril Ramli.

Dari tahun 1994 s/d 1999 telah terjadi tiga kali pertukaran kepemimpinan hingga pada tahun 2000, Dinas Pariwisata mendapati tugas yang sangat penting untuk mengurus/ mengelola kebudayaan tradisional yang ada di Padang, oleh sebab itu Dinas Pariwisata Kota Padang berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Sering berjalannya waktu kursi kepemimpinan terus berganti, sampai pada tahun 2015 telah terjadi sembilan kali pergantian kepemimpinan.

Pada akhir tahun 2015 berganti lagi pimpinannya yaitu Medi Iswandi, ST., MT. Dengan terbitnya Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Dengan STOK baru ini Meida Iswandi, ST., MT. Menduduki jabatan kepala dinas sampai tanggal 6 Februari 2019. Pada tanggal 11 juni 2019 dilantiklah Drs, Arfian secara definitif oleh Walikota padang sebagai kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pada awal Januari 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berganti nama menjadi Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata.

3.2 Profil Dinas Pariwisata Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata, ditetapkan pada awal januari 2021 yang sebelumnya bernama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berganti nama menjadi Dinas Pariwisata. Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata, tugas yang dilaksanakan Dinas Pariwisata yaitu membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas yang dimaksud, maka dinas pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif
6. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Logo Dinas Pariwisata Kota Padang



Gambar 3.1 Logo Dinas Pariwisata Kota Padang

Sumber: <https://pariwisata.padang.go.id>

3.4 Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Padang

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Pariwisata memiliki visi dan misi. Dalam rangka mendukung tercapainya visi Kota Padang yaitu “Menjadikan Padang Sebagai Destinasi Wisata Pesisir yang Nyaman dan Berkesan”. Untuk

mewujudkan visi tersebut serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi dinas

yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Dinas Pariwisata Kota Padang menetapkan Visi sebagai berikut:

Visi

“Menjadikan Padang sebagai Menjadikan Padang Sebagai Destinasi Wisata Pesisir yang Nyaman dan Berkesan”

Misi

1. Meningkatkan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dengan cara holistik serta berkepanjangan dengan mengikutsertakan peran aktif dari masyarakat.
2. Menjaga dan mengembangkan adat budaya Minangkabau yang beraneka ragam sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang turun temurun dipraktikan dan dipelihara.
3. Mengembangkan potensi pulau-pulau kecil sebagai kawasan potensial pengembangan pariwisata ke depan, khususnya wisata bahari.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata sehingga mampu mengembangkan peranannya dalam pembangunan umumnya dan pendapatan daerah pada khususnya.

5. Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk daya tarik wisata.
6. Mengembangkan usaha ekonomi lokal serta melengkapi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata.

3.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang berdasarkan peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pariwisata terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Destinasi Pariwisata;
 - 2) Seksi Daya Tarik Pariwisata.
5. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata;

- 2) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas (*job description*) bagian/unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam urusan umum, perlengkapan dan peralatan, keuangan, kepegawaian,

kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, sekretaris dibantu oleh 2 bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pengelolaan administrasi barang milik daerah yang berada pada Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, peralatan dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan kehumasan, komunikasi, informasi, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas.

3. Bidang Program

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam menghimpun data dan menyusun program dan perencanaan Dinas.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan mengenai program dan perencanaan Dinas.

4. Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

a. Seksi Destinasi Pariwisata

Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memajukan dan mengembangkan destinasi pariwisata.

b. Seksi Daya Tarik Pariwisata

Seksi Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memajukan dan mengembangkan daya tarik pariwisata.

5. Bidang Pemasaran

a. Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata

Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran dalam memajukan dan mengembangkan pemasaran pariwisata.



b. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata

Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memajukan, mengembangkan kerjasama dan kemitraan pariwisata.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

a. Seksi pengembangan Ekonomi Kreatif

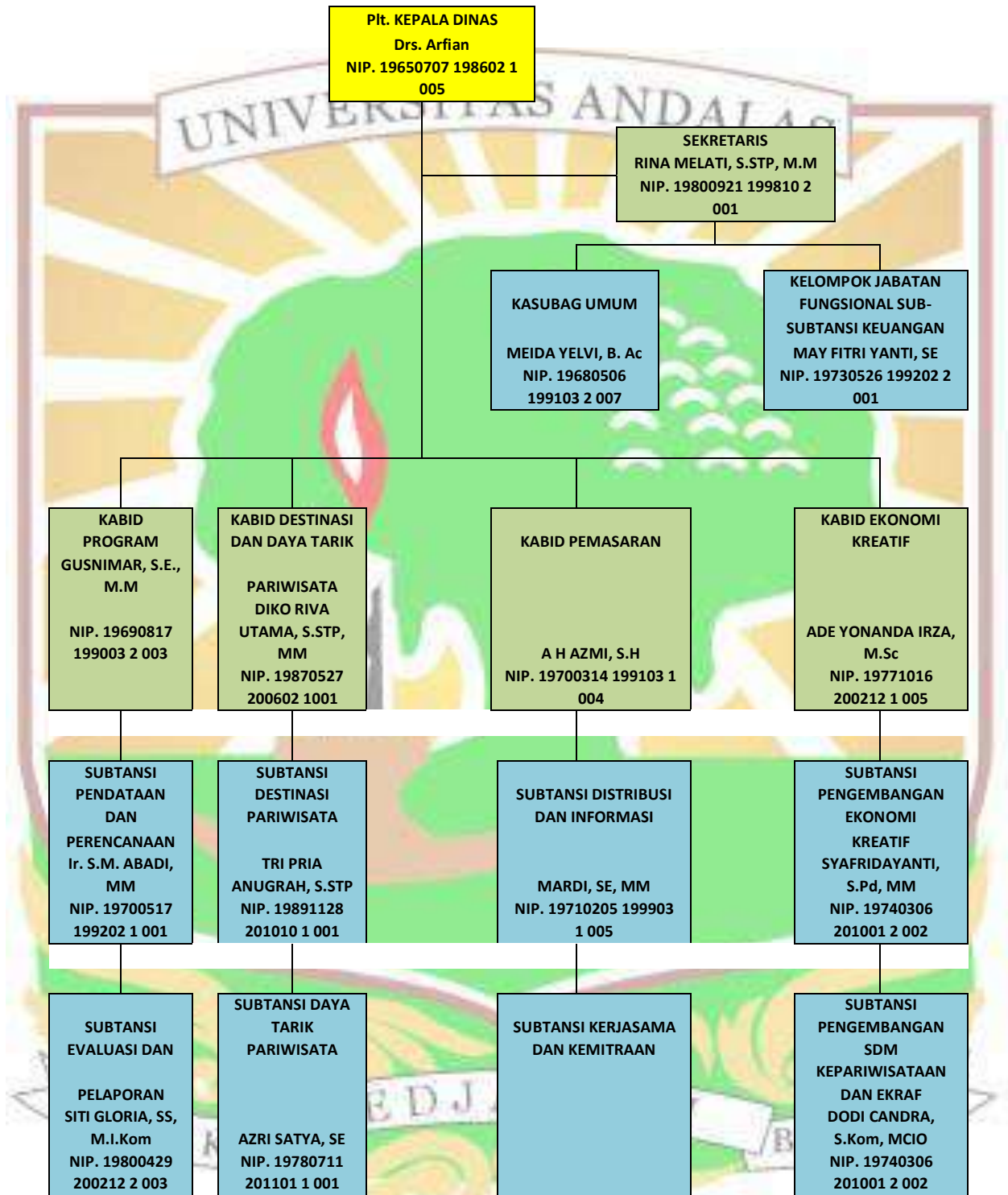
Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam memajukan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam memajukan dan mengembangkan Ekonomi Kreatif.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNIVERSITAS ANDALAS

4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang disusun untuk menggambarkan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam periode tertentu, biasanya tahunan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006, yang dimaksud laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Tujuan utama dari pembuatan LRA adalah:


1. **Monitoring dan Evaluasi:** LRA membantu dalam memantau dan mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah direncanakan terealisasi dalam praktik. Ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

2. **Transparansi:** Dengan adanya LRA, informasi mengenai penggunaan anggaran menjadi lebih transparan. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan atau korupsi.

3. **Akuntabilitas:** LRA mendukung akuntabilitas publik dengan menunjukkan kepada pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan lembaga pengawas, bagaimana dana publik digunakan. Ini membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.

4. **Perencanaan Anggaran:** Informasi dari LRA dapat digunakan untuk perencanaan anggaran di masa depan. Dengan memahami bagaimana anggaran digunakan di masa lalu, pengelola anggaran dapat membuat estimasi dan rencana yang lebih realistis untuk periode berikutnya.

5. **Kepatuhan Hukum:** LRA juga berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan yang telah ditetapkan.



6. **Pengambilan Keputusan:** Informasi dalam LRA dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya dan prioritas pengeluaran di masa depan.

Secara keseluruhan, LRA merupakan alat penting dalam sistem pengelolaan keuangan publik yang membantu memastikan bahwa anggaran digunakan dengan cara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2009;21). terdiri dari:

- a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hal pertama yang harus ada didalam membuat laporan realisasi anggaran. Alasannya karena pendapatan merupakan Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar Kembali oleh Pemerintah.

- 
- b. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara dalam suatu instansi yang dapat mengurangi saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Segala sesuatu yang telah dikurangkan dari saldo anggaran lebih tidak akan mendapatkan pembayaran Kembali, sehingga harus dilakukan dengan seksama.
- c. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.
- d. Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memenuhi peraturan yang berlaku, tidak jarang terjadi suatu Kerjasama antra salah satu instansi dengan

instansi dengan terakut lainnya. Hal inilah yang mendasari unsur transfer dalam melakukan pelaporan.

f. Pembiayaan (financing) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

g. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

LRA juga mencerminkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui LRA, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan saat membuat LRA. Pentingnya langkah yang diambil berpengaruh terhadap keakuratan sebuah laporan dan memudahkan pemahaman bagi pembaca laporan tersebut.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diperhatikan dalam membuat LRA:

1. Membandingkan Anggaran dan Realisasi Keuangan

Dari anggaran yang telah diterima, harus dibandingkan dengan realisasi keuangan yang berikutnya akan dilakukan sesuai dengan anggaran tersebut. Hasil perbandingan ini dapat diketahui dengan lebih baik dengan menggunakan tabel dan grafik, sehingga pembaca pun dapat memahami laporan lebih dalam.

Penting bagi pembuat laporan dalam membuat perbandingan antara kinerja anggaran dengan realisasinya untuk mengetahui ketepatan dalam penggunaan anggaran yang telah didapatkan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

2. Membandingkan Anggaran Kas dan Realisasi Keuangan

Anggaran kas yang didapatkan oleh suatu instansi diharapkan dapat memperlancar kegiatan perusahaan terkait dengan arus masuk dan arus keluar dari instansi maupun perusahaan tersebut. Maka anggaran tersebut harus dibandingkan dengan kinerja realisasi

keuangan supaya dapat mengetahui secara akurat atas pencatatan laporan yang berlangsung.

3. Membandingkan Anggaran dengan Realisasi Belanja

Kegiatan belanja menjadi penting bagi kelangsungan kegiatan instansi. Terjadinya kegiatan perbelanjaan tersebut harus dibandingkan dengan pendapatan anggaran yang telah masuk ke dalam rekening instansi atau entitas pelaporan.

Di dalam membuat laporan realisasi anggaran, harus dicantumkan identifikasi jelas di setiap halaman laporan.

Misalnya nama dari entitas atau pun sarana entitas, mata uang yang dipakai, cakupan entitas pelaporan, periode cakupan, serta satuan angka yang digunakan.

4. Membuat Grafik Realisasi Keuangan pada Setiap Program di Setiap Bulannya

Adanya grafik dapat mempermudah pembacaan catatan laporan. Perbandingan antara beberapa unsur laporan terhadap pendapatan anggaran pun dapat lebih mudah dipahami.

Selain uraian dan tabel, grafik merupakan faktor laporan yang sangat penting karena lebih ringkas dan tidak memakan banyak waktu untuk dapat memahami suatu laporan

4.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana pendapatan yang direncanakan dalam anggaran tahunan telah direalisasikan selama periode tertentu. Laporan ini penting untuk memantau kinerja keuangan dan mengevaluasi efektivitas perencanaan pendapatan. Proses Realisasi Pendapatan adalah proses pendapatan yang diterima setelah produk atau jasa dikerjakan dan terealisasi melalui penjualan langsung maupun kontrak penjualan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan memiliki beberapa tujuan penting dalam manajemen keuangan, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran publik atau organisasi. Berikut adalah tujuan utama dari laporan tersebut:

1. Evaluasi Kinerja Pendapatan

- **Mengukur Efektivitas:** Membantu mengevaluasi seberapa efektif anggaran pendapatan yang direncanakan telah dilaksanakan dalam praktik. Ini memberikan wawasan tentang apakah target pendapatan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
- **Identifikasi Varians:** Menunjukkan perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pendapatan aktual. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana pendapatan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

- **Memberikan Informasi:** Menyediakan informasi yang transparan mengenai pendapatan yang diterima dibandingkan dengan yang direncanakan. Ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang akuntabel.
- **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Membantu membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dikelola dengan baik dan sesuai dengan rencana.

3. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

- **Basis untuk Perencanaan:** Menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan anggaran di masa depan. Dengan memahami bagaimana pendapatan aktual dibandingkan dengan yang direncanakan, perencana anggaran dapat membuat proyeksi yang lebih akurat untuk periode mendatang.
- **Pengambilan Keputusan:** Membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya dan prioritas pengeluaran berdasarkan informasi pendapatan yang akurat.

4. Pencegahan dan Perbaikan

- **Mengidentifikasi Masalah:** Membantu dalam mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan pendapatan, seperti ketidakmampuan mencapai target atau masalah dalam pengumpulan pendapatan.
- **Tindak Lanjut dan Koreksi:** Menyediakan dasar untuk tindak lanjut dan koreksi jika pendapatan tidak sesuai dengan target. Ini memungkinkan penyesuaian kebijakan atau prosedur untuk meningkatkan hasil di masa depan.

5. Kepatuhan Hukum dan Regulasi

- **Mematuhi Regulasi:** Memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan pendapatan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini sering kali diperlukan untuk kepatuhan hukum dan audit.

6. Analisis Kinerja Keuangan

- **Analisis Trend:** Memberikan data untuk analisis tren pendapatan dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam memahami pola pendapatan dan bagaimana faktor-faktor eksternal atau kebijakan internal mempengaruhi hasil.

- **Evaluasi Sumber Pendapatan:** Membantu mengevaluasi efektivitas berbagai sumber pendapatan, seperti pajak, retribusi, atau hibah, dan menilai kontribusi mereka terhadap total pendapatan.

Berikut adalah beberapa poin Komponen Utama Laporan yang umumnya dicakup dalam laporan realisasi anggaran pendapatan:

- **Pendahuluan:** Penjelasan umum mengenai periode laporan, tujuan laporan, dan ringkasan anggaran pendapatan.
- **Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan:** Menyajikan data anggaran pendapatan yang direncanakan, realisasi pendapatan, dan selisih antara keduanya.
- **Analisis Varians:** Penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan pendapatan aktual, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi varians.
- **Rekomendasi:** Saran untuk penyesuaian anggaran atau perbaikan berdasarkan hasil laporan.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2020 – 2021 :



Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	112.240.686,00	7,48	530.477.025,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	112.240.686,00	7,48	530.477.025,00
Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	112.240.686,00	7,48	530.477.025,00
Retribusi Jasa Umum	415.800.000,00	11.275.000,00	2,71	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	415.800.000,00	11.275.000,00	2,71	0,00
Retribusi Kios	415.800.000,00	11.275.000,00	2,71	0,00
Retribusi Jasa Usaha	1.084.200.000,00	100.965.686,00	9,31	530.477.025,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.084.200.000,00	100.965.686,00	9,31	530.477.025,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.084.200.000,00	100.965.686,00	9,31	530.477.025,00

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari pendapatan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan total pendapatan sebesar Rp112.240.686,00 dengan persentase sebesar 7,48 % setelah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan total pendapatan sebesar Rp530.477.025,00. penurunan ini terjadi karena pada tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan retribusi disektor retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi kios.

4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Laporan realisasi anggaran belanja merupakan dokumen yang menggambarkan penggunaan anggaran belanja yang telah dialokasikan untuk sebuah periode tertentu, biasanya dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Laporan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah disetujui telah digunakan, serta untuk memantau pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap rencana keuangan.

Berikut adalah beberapa poin yang umumnya dicakup dalam laporan realisasi anggaran belanja:

1. **Ringkasan Anggaran:** Menyajikan rincian anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing program, proyek, atau bagian organisasi.

- 
2. **Pengeluaran Aktual:** Menyajikan jumlah uang yang telah dikeluarkan untuk setiap pos anggaran yang termasuk dalam laporan, baik itu untuk belanja operasional, modal, atau lainnya.
 3. **Perbandingan dengan Anggaran Awal:** Membandingkan anggaran yang telah direncanakan dengan pengeluaran aktual untuk menunjukkan seberapa baik anggaran tersebut terpenuhi.
 4. **Analisis Varian:** Menjelaskan penyimpangan antara anggaran awal dan pengeluaran aktual serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.
 5. **Kelebihan atau Kekurangan Dana:** Jika ada kelebihan atau kekurangan dana dari anggaran yang telah ditetapkan, laporan ini juga akan mencakup langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi situasi tersebut.
 6. **Kesimpulan dan Rekomendasi:** Menyajikan kesimpulan dari laporan realisasi anggaran belanja serta rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian di masa mendatang.

Laporan realisasi anggaran belanja ini merupakan alat penting dalam manajemen keuangan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif dari sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi.

Berikut adalah tujuan utama dari laporan tersebut:

- **Evaluasi Pengeluaran:** Memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang direncanakan dan mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara anggaran dan realisasi.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana anggaran belanja digunakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- **Perencanaan dan Pengambilan Keputusan:** Membantu dalam perencanaan anggaran mendatang dan pengambilan keputusan berbasis data mengenai alokasi belanja.
- **Pencegahan dan Perbaikan:** Mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dalam belanja untuk melakukan koreksi atau penyesuaian yang diperlukan.
- **Kepatuhan Hukum:** Memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2020 – 2021 :



uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Daerah	22.947.549.162,00	18.060.303.369,00	78,70	11.372.505.406,00
Belanja Operasi	14.558.503.687,00	13.181.581.598,00	90,54	10.954.056.106,00
Belanja Pegawai	4.873.062.262,00	4.190.555.119,00	85,99	3.658.080.197,00
Belanja Barang dan jasa	9.685.441.425,00	8.991.026.479,00	92,83	7.295.975.909,00
Belanja Modal	8.389.045.475,00	4.878.721.771,00	58,16	418.449.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.991.475,00	102.014.500,00	92,75	418.449.300,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(21.447.549.162,00)	(17.948.062.683,00)	83,68	(10.842.028.381,00)

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari belanja pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan total belanja sebesar Rp18.060.303.369,00 dengan persentase yaitu 78,70% setelah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan total belanja sebesar Rp11.372.505.406,00. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan belanja di beberapa sektor, seperti disektor belanja operasi dan belanja modal.

4.1.3 Pembahasan

Penilaian kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Padang pada tahun 2020 – 2021 mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2020 – 2021 menunjukkan hasil kinerja yang tidak efektif.

Penilaian kinerja yang tidak efektif ini dikarenakan secara pendapatan yang didapatkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang mengalami penurunan ditahun 2021 yaitu sebesar Rp112.240.686,00 dengan persentase sebesar 7,48 % setelah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan total pendapatan sebesar Rp530.477.025,00. penurunan ini terjadi karena pada tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan retribusi disektor retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi kios.

Sedangkan belanja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota padang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp18.060.303.369,00 dengan persentase yaitu 78,70% setelah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan total

belanja sebesar Rp11.372.505.406,00. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan belanja di beberapa sektor, seperti disektor belanja operasi dan belanja modal.

Dengan kondisi seperti itu membuat kondisi keuangan Dinas Pariwisata Kota Padang mengalami defisit Anggaran yang Dimana pada tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebesar (10.842.028.381,00) dan pada tahun 2021 sebesar (17.948.062.683,00), sehingga dengan kondisi seperti itu membuat penilaian kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Padang pada tahun 2020 – 2021 mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menunjukkan hasil kinerja yang tidak efektif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata kota Padang

Realisasi Pendapatan pada Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan dengan persentase yang didapatkan yaitu sebesar 7,48% setelah dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. penurunan ini terjadi karena pada tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan retribusi disektor retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi kios.

b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Kota Padang

Realisasi Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 78,70% setelah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Peningkatan ini terjadi dikarenakan

pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan belanja di beberapa sektor, seperti disektor belanja operasi dan belanja modal.

c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Kota Padang

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2020 – 2021 mengalami defisit Anggaran yang Dimana pada tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebesar (10.842.028.381,00) dan pada tahun 2021 sebesar (17.948.062.683,00), sehingga dengan kondisi seperti itu membuat penilaian kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Padang pada tahun 2020 – 2021 mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menunjukkan hasil kinerja yang tidak efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya, peneliti memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan, Adapun saran – saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kota Padang dapat Meningkatkan upaya pengumpulan retribusi melalui audit dan strategi penagihan yang lebih efektif, melakukan Evaluasi dan tingkatkan strategi untuk menarik hibah dan

retribusi, serta melakukan identifikasi dan eksplorasi sumber pendapatan tambahan untuk menutupi kekurangan.

2. Dinas Pariwisata Kota Padang dapat melakukan perencanaan anggaran dengan tim dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, membuat prosedur pengendalian belanja yang lebih ketat dan implementasikan sistem persetujuan, serta melakukan penyusunan Anggaran yang baru dengan mempertimbangkan data aktual, sehingga lebih realistis agar bisa mengurangi kemungkinan terjadinya defisit anggaran



DAFTAR PUSTAKA

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik* (2010).

Andhyka Muttaqin, *Dinamika Politik Anggaran Pendidikan* (2023).

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*, Jakarta : Salemba Empat.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi III*. Bandung: Alfabeta

Website resmi Dinas Pariwisata Kota Padang

<https://pariwisata.padang.go.id>



TA Verdyansyah Ptrah Adhiza

ORIGINALITY REPORT

27% SIMILARITY INDEX
28% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	majoo.id Internet Source	5%
2	pdfcoffee.com Internet Source	4%
3	eprints.polbeng.ac.id Internet Source	3%
4	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	3%
5	www.gramedia.com Internet Source	2%
6	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	2%
8	pdffox.com Internet Source	2%
9	www.kompas.com Internet Source	2%
10	www.ojs.unanda.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On